

Collaborative Governance Dalam Pembangunan Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas Negeri Surabaya Di Kabupaten Magetan

Febri Yeni Agustina

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
febri.19034@mhs.unesa.ac.id

Galih Wahyu Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
galihpradana@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Collaborative governance merupakan kolaborasi yang melibatkan lebih dari satu *stakeholder* dalam menjalankan suatu program atau kebijakan dengan adanya komitmen saling membantu dan bekerjasama. Pemerintah Kabupaten Magetan menggandeng Universitas Negeri Surabaya sebagai instansi publik yang bergerak pada bidang pendidikan untuk membantu mengatasi permasalahan SDM Kabupaten Magetan melalui pembenahan aksesibilitas perguruan tinggi. Pada kolaborasi yang dijalin oleh Unesa dan Pemkab Magetan ini mengusung Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unesa Kampus Magetan. Sayangnya PSDKU ini belum bisa segera dimulai karena terkait dengan kendala izin yang belum kunjung keluar dari Dirjen Dikti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *collaborative governance* antara Pemkab Magetan dan Universitas Negeri Surabaya dalam upaya peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan PSDKU Unesa Kampus Magetan. Berpedoman pada teori dari Schottle, Haghsheno dan Gehbauer (2014) yang mengatakan bahwa kompromi jangka panjang dalam bentuk otonomi, kerjasama dan kolaborasi terdiri dari Kesediaan berkompromi, Komunikasi, Komitmen, Saling percaya, Transparansi/ pertukaran informasi, Berbagi pengetahuan, Kesediaan mengambil risiko. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan komunikasi pada lingkup yang lebih luas masih luput dilakukan. Sehingga berdasarkan hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan kolaborasi yang terjalin antara Universitas Negeri Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pembangunan PSDKU Unesa Kampus Magetan dapat dikatakan sejauh ini masih terdapat faktor penghambat pada indikator komunikasi.
Kata Kunci: *collaborative governance*, sumber daya manusia, PSDKU

Abstract

Collaborative governance is a collaboration that involves more than one stakeholder in carrying out a program or policy with a commitment to help and cooperate with each other. The Government of Magetan Regency cooperates with State University of Surabaya as a public agency engaged in education to help overcome the human resources problems of Magetan Regency through improving the accessibility of universities. In this collaboration, which was established by Unesa and the Government of Magetan Regency, it carries the Study Program Outside the Main Campus (PSDKU) of Unesa Magetan Campus. Unfortunately, this PSDKU cannot be started immediately because it is related to permit constraints that have not yet come out of the Director General of Higher Education. The purpose of this study is to determine the implementation of collaborative governance between the Government of Magetan Regency and State University of Surabaya in an effort to improve the quality of human resources through the development of PSDKU Unesa Magetan Campus. Guided by the theory of Schottle, Haghsheno and Gehbauer (2014) who say that long-term compromise in the form of autonomy, cooperation and collaboration consists of Willingness to compromise, Communication, Commitment, Mutual trust, Transparency / exchange of information, Knowledge sharing, Willingness to take risks. The research method that researcher used is descriptive with a qualitative approach. The data collection uses interview, observation and documentation techniques. The results of this study show that communication relations in a wider scope are still missed. So based on the results of the research above, it can be concluded that the collaborative relationship established between State University of Surabaya and the Magetan Regency Government in the construction of the Unesa PSDKU Magetan Campus can be said that so far there are still inhibiting factors in communication indicators.

Keywords: collaborative government, human resources, PSDKU

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah guna melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemkab Magetan berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya dengan membuka Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unesa Kampus Magetan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan keunggulan bagi generasi penerus, sehingga Indonesia dapat mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Namun untuk mencapai itu ada beberapa aspek yang harus dibenahi, salah satunya pendidikan. Menurut data tahun 2021 yang bersumber dari *World Population Review*, tingkat pendidikan Indonesia berada pada peringkat 54 dunia dari total 78 negara yang masuk kedalam pemeringkatan. Posisi tersebut membuat miris mengingat berbagai masalah pendidikan di Indonesia sudah berlangsung lama dan belum teratasi dengan baik salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Berdasarkan hasil survei Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2021, Hanya 16,7 persen atau 17,08 juta jiwa yang dapat mengenyam pendidikan tinggi dari total penduduk Indonesia. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang menduduki peringkat keempat terbanyak di dunia. Banyak faktor yang menjadi alasan kondisi tersebut dapat terjadi, salah satunya keterbatasan akses pendidikan di berbagai kota dan kabupaten kecil di Indonesia.

Adanya kesenjangan layanan pendidikan di antar wilayah di Indonesia seperti perkotaan dan pedesaan dapat menyebabkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan mengalami kesenjangan. Keterbatasan jumlah layanan pendidikan yang tersedia di daerah pedesaan berdampak pada keterjangkauan jarak layanan pendidikan dengan tempat tinggal. Namun berbeda dengan daerah perkotaan di Indonesia yang memiliki aksesibilitas lebih mudah dan cenderung lebih dekat dengan berbagai fasilitas publik seperti sekolah bahkan universitas (Perdana, 2015). Kesenjangan tersebut sangat nyata terlihat dan memerlukan perhatian yang serius.

Berdasarkan informasi pada gambar 1, dapat dilihat bahwa kesenjangan pendidikan yang terjadi berdasarkan tipe daerah di Indonesia. Untuk penduduk berusia 15 tahun keatas yang tinggal di daerah perkotaan sebagian besar tamatan Sekolah Menengah/Sederajat, sedangkan untuk penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang tinggal di daerah pedesaan di dominasi oleh tamatan Sekolah Dasar/ Sederajat. Tentu kondisi ini menjadi keresahan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pihak perguruan tinggi.



Gambar 1 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditempatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 2021

Sumber: BPS, Susenas 2021

Berdasarkan data dari Kemnaker RI tahun 2021, angkatan kerja di Indonesia masih didominasi berpendidikan di bawah SMP. Sebanyak 54,66 persen angkatan kerja di Indonesia berpendidikan di bawah SMP, kemudian tenaga kerja dengan lulusan pendidikan SMA/SMK sederajat sebanyak 32,33 persen, diikuti dengan 13,01 persen yang memiliki pendidikan diploma dan sarjana serta magister. Tenaga kerja dengan pendidikan rendah cenderung bekerja pada sektor informal yang tidak terlalu memerlukan keahlian atau keterampilan spesifik. Sementara untuk tenaga kerja dengan pendidikan tinggi lebih banyak mengisi sektor formal. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendorong SDM sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya pada usia kerja supaya dapat bersaing di dunia kerja.

Tentunya untuk mendukung kemajuan pembangunan nasional, harus ada reformasi birokrasi untuk merubah paradigma tata kelola pemerintahan yang tadinya bergerak terpisah menjadi bekerja sama untuk memudahkan dalam mencapai tujuan. *Collaborative governance* dapat menjadi salah satu pilihannya. Secara singkat *collaborative governance* adalah kolaborasi yang melibatkan lebih dari satu *stakeholder* dalam menjalankan suatu program atau kebijakan dengan adanya komitmen saling membantu dan bekerjasama. Sehingga pemerintah dapat bersinergi dan membangun komitmen dengan instansi lain baik itu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media untuk membantu penyelesaian masalah daerahnya, dapat disebut juga manajemen kinerja lintas lembaga (Ansell, Chris and Gash, 2008). Di sisi lain, praktik *collaborative governance* dapat menciptakan efektivitas bagi para *stakeholders* yang terlibat (Eprilianto et al., 2020). D

Kabupaten Magetan merupakan kabupaten kecil bertopografi daerah pegunungan dengan total penduduk tahun 2021 sebanyak 674.133 jiwa. Letaknya berada di ujung barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akses pendidikan tinggi pada wilayah Provinsi Jawa

Timur bagian barat sendiri sangat minim. Berdasarkan fakta empiris, selama ini akses pendidikan tinggi serta kampus-kampus negeri dengan kualitas baik kebanyakan menumpuk di Provinsi Jawa Timur bagian timur. Artinya pemerataan pendidikan tinggi di wilayah ini perlu ditingkatkan lagi, serta memerlukan perhatian lebih dari pemerintah setempat dan aktor di bidang pendidikan agar dapat mendorong peningkatan kualitas SDM penduduknya melalui pendidikan.

Bagi suatu daerah, penduduk merupakan salah satu unsur yang penting untuk pembangunan daerah. Potensi yang dimiliki penduduk suatu daerah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magetan per tahun 2021 terus mengalami kemajuan. Selama periode tahun 2020 sampai 2021, komponen pembentuk IPM Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan. Informasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Magetan Tahun 2021

Komponen Pembentuk IPM	Tahun 2020	Tahun 2021
Harapan hidup bayi yang baru lahir	72,59 tahun	72,65 tahun
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,03 tahun	14,04 tahun
Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25thn+)	8,24 tahun	8,36 tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2021

Kesempatan kerja di kabupaten Magetan per tahun 2020 adalah 96,26 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) yang berada di angka 96,20 persen. Hal ini mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Magetan mengalami peningkatan pula, menyentuh angka 14.283 orang yang sebelumnya 11.299 orang di tahun 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka ini juga erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki para pencari kerja. Sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh olah data Sakernas tahun 2019-2020, banyaknya usia kerja yang menganggur berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Magetan didominasi oleh tamatan SLTA umum sebanyak 3.079 orang dan SLTA kejuruan sebanyak 4.455 orang. Hal ini sangat disayangkan karena mengingat SLTA kejuruan yang memang didesain untuk disiapkan terjun ke lapangan kerja memiliki tingkat pengangguran yang tinggi.

Jumlah pencari kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Magetan sendiri lebih banyak didominasi oleh lulusan SLTA sederajat dibandingkan dengan tamatan akademi dan universitas yang mengekor

di belakangnya. Usia produktif dapat menjadi modal suatu daerah dalam usaha pemajuan daerah melalui sumber daya manusia. Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan per tahun 2021, juga menyatakan bahwa Kabupaten Magetan telah mencapai bonus demografi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68.81 ribu jiwa yang artinya penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif.

Tentunya berbagai kondisi SDM ini merupakan modal awal yang menjanjikan untuk membangun sebuah daerah menjadi lebih maju menggunakan potensi sumber daya manusia yang ada. Salah satu kunci dari berhasilnya strategi dalam mengatasi masalah SDM adalah kerjasama antara pemerintah pusat bersama daerah serta perguruan tinggi (Rahaju et al., 2020). Modal yang dimiliki, perlu wadah yang tepat untuk berkembang dan Unesa dinilai mampu mewartahi hal tersebut. Sebenarnya jika dilihat dari data di atas, IPM Kabupaten Magetan dikatakan terus meningkat cukup baik, hanya saja disayangkan pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tidak mengalami kemajuan yang signifikan, yakni hanya meningkat 0,01 persen menjadi 14,04 tahun. Namun, disisi lain, Rata-rata Lama Sekolah yang ditempuh oleh penduduk Magetan menyentuh angka 8,36 tahun. Artinya, ada ketidaksesuaian antara harapan dengan realita yang terjadi di masyarakat.

Keadaan ini dapat berarti akses pendidikan bagi masyarakat Magetan masih terbatas dan dipengaruhi beberapa faktor. Seperti kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan, sarana dan prasarana, sulitnya akses, dan biaya yang dialami masyarakat. Dengan adanya kolaborasi PSDKU antara Unesa dan Pemkab Magetan diharapkan menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang ingin berkuliah dengan jarak dekat dan biaya yang murah tetapi tetap memiliki standar kualitas baik. Selain itu, adanya tuntutan bahwa pemerintah harus lebih menekankan *network* baik vertikal maupun horizontal sehingga Pemkab Magetan menerapkan model *collaborative governance* sebagai jalan keluar dalam memajukan SDM melalui bidang pendidikan tinggi (Nurron et al., 2022).

Adapun kolaborasi yang dilakukan oleh Pemkab Magetan dengan Unesa melalui pembangunan Program Studi di luar Kampus Utama (PSDKU). Hal ini selaras dengan tujuan Kabupaten Magetan untuk menjadi kota tujuan pendidikan di Jawa Timur. Mengingat sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, sebuah perguruan tinggi berkewajiban untuk memandu perkembangan serta berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan termasuk

tantangan lokal maupun global (Pfeifer dan Schwab, 2022).

Langkah Unesa memilih Kabupaten Magetan untuk membuka PSDKU dinilai sangat tepat dan dipandang sebagai *best practice* dalam pemerataan pendidikan tinggi di Jawa Timur. Mengingat Unesa sendiri sudah terakreditasi A dan memiliki berbagai jurusan unggulan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat Magetan.. Kabupaten Magetan sebagai instansi daerah memandang kolaborasi dapat menjadi jalan keluar bagi peningkatan kualitas SDM melalui pembenahan pendidikan. Sehingga Magetan akhirnya menggandeng Unesa dalam menjalin *collaborative governance* dengan mengusung program pembangunan PSDKU Unesa Kampus Magetan.

Dikutip dari sambutan Rektor Unesa pada kegiatan *Grand Launching* PSDKU Unesa Magetan, Nurhasan mengungkapkan bahwa PSDKU ini sebagai upaya Unesa untuk berperan lebih dalam dunia pendidikan. Karena menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya sekedar berkewajiban mencerdaskan bangsa, namun juga pendukung pembangunan dan kemakmuran bangsa. Unesa memilih Magetan sebagai tempat pendirian PSDKU pertama karena dianggap cocok dengan visi bahwa meningkatkan mutu pendidikan memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang luar biasa serta posisinya yang strategis menjadi wajah Provinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Dalam acara yang sama, Bupati Magetan juga menilai bahwa pembangunan PSDKU Unesa Magetan akan mendorong pemerataan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur sebelah barat. Sehingga anak-anak di sekitar wilayah matraman (wilayah karesidenan Madiun) dapat bersaing di dunia kerja dengan berbekalkan ilmu pengetahuan.

Hal ini sebagai salah satu bentuk keseriusan Pemkab Magetan dalam membenahi kualitas SDM daerahnya. Atas dasar pemikiran bahwa pendidikan adalah investasi masa depan, maka perencanaan pembangunan sektor pendidikan disusun dalam bentuk perencanaan jangka panjang. Pentingnya peran pendidikan bagi SDM, Pemkab Magetan menjalin kolaborasi dengan civitas akademis untuk menunjang sektor pendidikan di tingkat universitas.

Realisasi kolaborasi Unesa dan Kabupaten Magetan melalui pembangunan PSDKU Unesa kampus Magetan. Dimulai dengan penandatanganan MoU antara pihak Unesa dengan Pemkab Magetan pada Sabtu, 28 November 2020 di Laboratorium Merdeka Belajar, Kampus Unesa, Lidah Wetan, Surabaya. Rencana awal kolaborasi ini akan menempati gedung SMA PGRI Maospati untuk perkuliahan sementara, dan membuka tiga prodi serta tidak menutup kemungkinan membuka prodi lain sembari menunggu proses pembangunan usai.

Namun pelaksanaan PSDKU ini bukan berarti tidak menemui kendala. Sebagaimana pemaparan Drs. Suwata, Msi. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, yang penulis dapatkan dari hasil wawancara 22 November 2022. Beliau mengatakan bahwa dengan dasar perjanjian awal, tanggung jawab Pemkab Magetan dalam kerjasama ini yakni menyediakan lahan untuk pembangunan gedung PSDKU serta gedung perkuliahan sementara sampai pembangunan gedung selesai. Fungsi penyediaan gedung perkuliahan sementara dimaksudkan agar saat pembangunan kampus Unesa Magetan selesai, maka kampus tersebut sudah memiliki mahasiswa dan kegiatan belajar mengajar bisa dilanjutkan. Akhirnya disepakati bahwa lahan untuk kampus PSDKU terletak di Kelurahan Mranggen, Kecamatan Maospati dan gedung SMA PGRI 1 Maospati sebagai tempat perkuliahan sementara.

Sayangnya, setelah semua sarana dan prasarana dipersiapkan ternyata PSDKU belum bisa dilaksanakan. Kendala ini terjadi berkaitan dengan izin PSDKU yang belum turun dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Akibatnya, *timeline* awal untuk membuka pendaftaran di tahun 2021 harus berubah dan ditunda sampai izin PSDKU keluar. Pada tahun 2023 bersamaan perubahan status Unesa menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) diharapkan PSDKU Unesa Kampus Magetan sudah dapat berjalan. Menurut Martadi, selaku koordinator perencanaan PSDKU mengatakan bahwa sempat juga mengalami kendala dengan pihak perguruan tinggi lokal. Saat awal kabar pembangunan PSDKU Unesa ini tersiar, ada kekhawatiran dari perguruan tinggi lokal bahwa PSDKU ini akan mengganggu eksistensi mereka. Namun dengan cepat kendala tersebut dapat diatasi dengan memberikan pemahaman bahwa program studi yang dibuka Unesa berbeda segmentasinya dengan program studi yang mereka miliki.

Banyak sekali hasil serta manfaat yang diharapkan dari adanya PSDKU Unesa Magetan ini. Aksesibilitas perkuliahan yang semakin mudah dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya minat masyarakat dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Suprawoto selaku Bupati Magetan, manfaat yang akan diterima baik dari segi sosial ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Karena daerah yang memiliki universitas di wilayahnya dapat melahirkan *multiplier effect* yang baik. Dimana orang-orang akan berdatangan dan wilayah tersebut menjadi ramai dan membutuhkan berbagai akses kebutuhan seperti kos, makanan siap saji, tempat kebutuhan pokok, *laundry* dan lain sebagainya.

Dari berbagai permasalahan hingga manfaat yang akan diterima dari terjalannya kolaborasi di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan *collaborative governance* dalam Pembangunan Program Studi di Luar

Kampus Utama (PSDKU) Universitas Negeri Surabaya di Kabupaten Magetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *collaborative governance* dalam Pembangunan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unesa di Kabupaten Magetan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melihat dan mendeskripsikan pelaksanaan *collaborative governance* antara Pemkab Magetan dan Unesa dalam upaya peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan PSDKU Unesa Kampus Magetan. Fokus penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini terdiri dari tujuh indikator di antaranya: 1) kesediaan berkompromi; 2) komunikasi; 3) saling percaya; 4) transparansi/pertukaran informasi; 5) berbagi pengetahuan; 6) kesediaan mengambil risiko.

Adapun sumber data terdiri dari sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Juga sumber data sekunder melalui studi kepustakaan (meliputi buku, jurnal, dokumen, majalah, berita dan sumber-sumber yang memiliki relevansi lainnya. Teknik penentuan informan atau sampling yakni menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri dan dipandang memiliki keterkaitan dengan populasi yang diterapkan berdasarkan tujuan dan permasalahan penelitian. Adapun informan yang dimaksud yaitu koordinator tim perencanaan PSDKU Unesa Kampus Magetan, perwakilan dari Pemkab Magetan, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Magetan, Kepala UPT Humas Unesa, dan Stakeholder terkait yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magetan

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang ada kemudian dianalisis dan diinterpretasikan melalui beberapa tahap yaitu pereduksian data, penyajian data dan verifikasi/ penyimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi, Kabupaten Magetan menerapkan *collaborative governance* dengan menggandeng pihak lain sebagai kolaborator untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pada *collaborative governance* yang diterapkan Magetan, pihak lain yang menjadi kolaboratornya adalah Universitas Negeri Surabaya dengan PSDKU sebagai program yang diusungnya. Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) merupakan penyelenggaraan program studi yang dilaksanakan di kota, kabupaten, atau kota administratif yang tempatnya tidak berbatasan

secara langsung dengan kota atau kabupaten dimana daerah kampus utama tersebut berada. PSDKU Unesa Kampus Magetan ini merupakan PSDKU pertama yang dimiliki oleh Universitas Negeri Surabaya diluar dari kampus induk yang berlokasi di Ketintang dan Lidah Wetan, Kota Surabaya.

Sebenarnya PSDKU ini sama saja dengan membuka prodi yang setara dengan prodi yang ada di kampus utama, baik dari segi kualitas, kurikulum maupun metode pengajarannya. Perbedaannya hanya terdapat pada lokasinya saja. PSDKU Unesa Magetan ini haruslah sama kualitasnya dengan kampus utama, sehingga proses penerimaan mahasiswa baru serta jadwal perkuliahan juga akan sama. Pada awal pembukaan PSDKU, masing-masing prodi akan menerima satu rombongan belajar mahasiswa yakni sejumlah 35-40 orang. Untuk jumlah mahasiswa di tahun berikutnya diperkirakan bertambah seiring bertambahnya prodi-prodi baru yang dibuka.

Pembukaan PSDKU Unesa Kampus Magetan menuai banyak antusiasme baik dari masyarakat hingga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan Unesa, antusiasme masyarakat Magetan terhadap PSDKU ini mencapai 89,7% dengan hasil masyarakat sangat antusias terhadap kabar pembukaan PSDKU Unesa di Magetan. Dirjen Dikti juga mengutarakan dukungan mereka terhadap pembangunan PSDKU ini sebagai upaya pemerataan pendidikan tinggi di Jawa Timur bagian barat dan berharap kualitas SDM akan merata sejalan dengan menyebarnya perguruan tinggi di berbagai wilayah Provinsi Jawa timur. Nantinya PSDKU Unesa Kampus Magetan akan memiliki konsep multi kampus, yaitu mahasiswa Unesa yang berkuliah di Magetan ini akan mengikuti program studi induk yang ada di kampus Surabaya sehingga akreditasinya juga akan sama. Kedepannya juga akan ada rencana bahwa mahasiswa Unesa yang berasal dari Magetan akan ditransfer untuk berkuliah di Magetan sesuai dengan ketersediaan program studi yang ada.

Terkait izin dari PSDKU sendiri pertama diajukan pada tahun 2021. Artinya, sudah satu tahun proses perizinan PSDKU ini bergulir di Dikti dan diperkirakan akan turun pada ajaran baru semester genap tahun 2023. Diharapkan perizinan PSDKU ini sudah *clear* seiring dengan perubahan Unesa menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Artinya Unesa menjadi kampus yang memiliki otonomi penuh dalam mengelola sistemnya baik akademik maupun non akademik. Sehingga, sifat perizinan PSDKU ini hanya berupa surat pemberitahuan saja dan bukan berbentuk surat izin, tetapi tetap atas sepengetahuan Dirjen Dikti.

1. Kesediaan Berkompromi

Sifat dasar dalam kompromi adalah pihak yang terlibat memiliki kesediaan untuk saling merasakan dan

memahami keadaan yang dimiliki oleh pihak lainnya, (Widyastuti, 2017). Proses ini perlu kesediaan dari pihak yang berkolaborasi untuk mencari titik temu dari permasalahan dan kesepakatan yang ada. Awal dari kolaborasi ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Warno sebagai berikut:

“Kolaborasi ini awalnya dari pihak Magetan kemudian melalui persetujuan kedua belah pihak. Jadi kita cukup menginisiasi saat itu, terus kita juga ikut membahas setidaknya daerah harus memfasilitasi anak-anak yang kita miliki di Magetan. Dan *alhamdulillah* Unesa sudah membangun kampus di Magetan.” (hasil wawancara bapak Warno selaku Wakil Ketua III DPRD Kab. Magetan).

Sebagai instansi publik yang erat kaitannya dengan pelayanan publik, maka kesediaan berkompromi sangat diperlukan dalam kegiatan diskusi. Diskusi tersebut dilakukan sebagai media penyaluran pendapat serta ide-ide guna memaksimalkan PSDKU. Dengan banyaknya individu yang terlibat dalam kolaborasi ini membuat kondisi dimana keberagaman pendapat yang harus disatukan sebagai solusi terbaik. Dimana untuk tindakan yang nantinya diambil dari hasil kompromi, harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab (Kooiman, 2007).

Unesa dan Pemkab Magetan sadar betul bahwa mereka sama-sama saling membutuhkan dalam proses untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud disini adalah memajukan sumber daya manusia melalui layanan akses pendidikan perguruan tinggi. Karena keterbukaan akses perguruan tinggi menjadi salah satu parameter untuk mendorong indikator IPM daerah dan IPM nasional naik. Unesa dapat mengepakkan sayapnya lebih lebar dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPT Humas Unesa berikut ini:

“Kepentingan Unesa dalam kolaborasi ini tentu untuk melaksanakan tugas kita sebagaimana yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi ya. Unesa juga memiliki semangat dalam pemerataan pendidikan tinggi. Selama ini *kan* pusat-pusat pendidikan ada di Jawa Timur bagian timur, sebagaimana semangat Unesa yaitu pemerataan pendidikan dan Magetan merupakan representasi dari Jawa Timur bagian barat sehingga kita tentunya antusias dengan adanya kolaborasi ini.” (hasil wawancara dengan Ibu Vinda selaku Kepala UPT Humas Unesa).

Sedangkan untuk Pemkab Magetan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memajukan daerahnya. Sebab, kemajuan daerah pasti diawali dari kesadaran pendidikan yang tinggi dari angka pendidikan yang tinggi di tingkat perguruan tinggi. Proses dalam menyatukan pandangan

ini juga berjalan lancar karena keduanya benar-benar membuka pemikiran mereka untuk saling bertukar pikiran dalam mencapai kata sepakat.

Kompromi dalam hal pembagian tanggung jawab dan juga wewenang sudah sangat jelas terlihat, ditunjukkan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU). Dalam tata kelola PSDKU ini dijelaskan bahwa Pemkab Magetan bertugas menyediakan lahan untuk pembangunan PSDKU, kemudian Pemkab Magetan menyetujui hal tersebut dengan syarat setelah proses hibah dilaksanakan, lahan tersebut segera dibangun dan setelahnya pihak Unesa harus mengelola itu. Pembagian wewenang serta tanggung jawab ini dibebankan oleh Bapak Martadi sebagai berikut:

“Pembagian tanggung jawab dan wewenang sudah sangat jelas, karena pada tata kelola *kan* sudah jelas di surat MoU bahwa Pemkab Magetan memberikan hibah tanah dan langsung dibangun. Begitu sudah dibangun, maka Unesa harus mengelola itu. Jadi pembagian wewenang sudah diatur jelas dan sudah diketahui oleh pusat (Dikti) juga.” (hasil wawancara dengan Bapak Martadi selaku Koordinator Tim Perencanaan PSDKU Unesa Kampus Magetan).

Kesediaan dalam berkompromi juga terlihat dari seringnya dilakukan rapat-rapat koordinasi yang diinisiasi oleh kedua pihak. Salah satunya adalah acara *Forum Group Discussion* pembukaan PSDKU Unesa di Kabupaten Magetan. Bertempat di Gedung *Student Center* Unesa Surabaya, membuat acara ini menjadi forum diskusi yang besar. Acara ini terselenggara pada bulan Mei 2021 silam dengan pembahasan terkait hasil studi kelayakan, *master plan*, naskah akademik hingga usulan terkait borang PSDKU. Turut dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti Bupati Magetan yang didampingi Asisten Pemerintahan bersama Kesra, pimpinan DPRD Kabupaten Magetan bersama Komisi A, Kepala OPD dan Bagian juga turut hadir didalam acara tersebut.

Sebelum Unesa, Pemkab Magetan pernah menawarkan pembangunan kampus di wilayah ini kepada Universitas Merdeka Madiun serta Universitas Sebelas Maret. Namun sayangnya kedua universitas tersebut tidak sanggup melaksanakan permintaan Pemkab Magetan untuk segera membangun bangunan kampus dalam waktu dekat. Kemudian saat penawaran tersebut diberikan kepada Unesa dan Unesa menyatakan kesiapan untuk segera membangun bangunan kampus, terciptalah kesepakatan dari kolaborasi ini dan kesediaan mereka untuk berkompromi. Kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pihak juga berpengaruh kepada kesediaan berkompromi. Kabupaten Magetan menginisiasi kolaborasi ini untuk membantu putra-putri daerahnya

mendapatkan pendidikan yang berkualitas sedangkan Unesa memiliki tujuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mewujudkan semangat mereka pada pemerataan pendidikan. Tujuan yang sejalan inilah yang menjadi motif mereka semangat bersedia kompromi membangun PSDKU Unesa Kampus Magetan.

Kesediaan dalam berkompromi menjadi salah satu faktor terlaksananya sebuah kolaborasi. Sebab kesediaan berkompromi tersebut membuat anggota kolaborasi lebih berani untuk mencoba (Bogdan dan Bilken, 1992). Unesa dan Magetan sama-sama menyatakan bahwa tidak sulit dalam menyatukan pandangan mereka untuk bersedia berkompromi. Keduanya saling bergerak maju untuk mencapai titik tengah dan kesepakatan dalam menyatukan pandangan.

2. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses pengiriman atau pendistribusian pesan antara dua orang atau lebih antara komunikator dan komunikan untuk memberikan pemahaman terhadap pesan yang dikirim (Pohan dan Fitria, 2021). Komunikasi menjadi komponen penting dalam menjaga hubungan kolaborasi. Sebab, kolaborasi berkenaan dengan intensitas komunikasi yang terjadi antar aktor yang terlibat. Didalam komunikasi terjadi dialog terutama yang berupa tatap muka (*face to face dialogue*). Proses dialog ini berupa dialog yang bersifat formal maupun informal (Sahita dan Ma'ruf, 2020).

Pertemuan awal yang dilakukan sebagai tahap awal komunikasi yang dijalin, kedua pihak melakukan pertemuan secara non formal untuk membicarakan perihal inisiasi kolaborasi dari pihak Pemkab Magetan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Warno sebagai berikut:

“Kita melakukan komunikasi itu berkali-kali. Jadi tidak hanya surat-menyurat saja, tapi juga menggelar pertemuan sampai ke Kementerian Pendidikan di Dikti sana. Beberapa kali ada DPRD yang kita wakili oleh Komisi A dan, Pak Bupati juga hadir di kementerian. Kita juga pertama kali bertatap muka awal di Kampus Unesa saat itu. Komunikasi sampai saat ini berjalan lancar.” (hasil wawancara Bapak Warno selaku Wakil Ketua III DPRD Kab. Magetan).

Merujuk pada wawancara di atas dapat diketahui bahwa pertemuan awal yang terjadi antar Unesa dan Pemkab Magetan merupakan titik *start* kolaborasi ini dapat terjadi. Pada tahun 2019 Bupati Magetan bertandang ke Surabaya dengan maksud dan tujuan agar Unesa dapat membuka kampus di Magetan. Saat sedang “*ngopi bareng*” bersama Rektor Unesa dan jajarannya, kemudian Bupati Magetan mengutarakan keinginan bagaimana kalau Unesa membuka kampus di daerahnya. Setelahnya hal tersebut ditindaklanjuti dengan adanya surat resmi dari Bupati Magetan ke Rektor Unesa pada

akhir tahun 2019 untuk mengajukan permohonan agar Unesa dapat membuka kampus di Magetan. Pada tahun 2020 awal, Rektor Unesa menunjuk Drs. Martadi, M.Sn. beserta tim untuk berdiskusi mengambil keputusan bagaimana peluang PSDKU Unesa ini jika dibuka di Kabupaten Magetan. Setelah melakukan proses studi kelayakan (*feasibility study*), lokasi, aksesibilitas serta daya dukung masyarakat, akhirnya Unesa sepakat bahwa akan membangun PSDKU pertama mereka di Kabupaten Magetan.

Komunikasi dan hubungan baik antara Pemkab Magetan dan Unesa terjalin sangat harmonis. Media komunikasi yang digunakan beragam sesuai dengan kebutuhan informasi apa yang akan disampaikan, mulai dari adanya agenda rapat serta forum diskusi baik yang sifatnya formal maupun informal. Kedua pihak memiliki pandangannya sendiri dalam menciptakan komunikasi yang efektif guna menjalin kedekatan dan menyatukan pandangan dalam berdialog. Sebagaimana keterangan dari Bapak Martadi berikut ini:

“Kita sering *ngopi-ngopi* ngobrol bareng di pendopo dalam suasana yang tidak resmi dan santai, kemudian sambil olahraga bersama yaitu tenis *bareng* meskipun pasti ada komunikasi formal ya. Jadi tidak hanya sekedar komunikasi formal tapi kita juga membuka ruang-ruang dialog informal. Dan itu menurut hemat saya sangat efektif dalam menjalin kedekatan.” (hasil wawancara dengan Bapak Martadi selaku koordinator tim perencanaan PSDKU Unesa Kampus Magetan).

Beberapa pertemuan hingga sampai pada taraf pusat (Dirjen dikti) dilakukan dengan dihadiri berbagai pihak yang berkenaan dalam kolaborasi ini. Menjadi tanda bahwa komunikasi formal dilakukan mestinya dengan perantara yang berkedudukan sebagai *control agent*.

Menurut hemat Martadi selaku Ketua Tim Perencanaan PSDKU, membangun komunikasi yang paling efektif adalah melalui komunikasi informal. Kegiatan komunikasi informal tersebut dapat memancing berbagai ide, gagasan serta pandangan dalam suasana yang tidak kaku sebagaimana jika menggunakan komunikasi formal. Unesa dan Pemkab Magetan sering bertemu serta ngobrol dengan suasana santai dan tidak resmi sembari “*ngopi*” dan “*tenis bareng*”. Meskipun untuk komunikasi formal juga pasti tetap ada seperti pertemuan, audiensi bersama DPRD Kabupaten Magetan dan rapat-rapat, namun kegiatan yang dapat membuka ruang-ruang dialog informal ini dapat menjalin kedekatan tersebut.

Peminimalisiran kendala dalam komunikasi juga harus diperhatikan dengan seksama. Intensitas komunikasi dapat menjadi salah satu solusi untuk menghindari kendala komunikasi. Seringnya komunikasi

yang dilakukan serta menjaga pihak lain agar selalu *keep in touch* dengan aktor kolaborasi. Mengadakan pertemuan berkali-kali dengan seringnya kegiatan surat-menyurat juga menjadi salah satu strateginya. Dengan cara tersebut kedekatan akan tetap terjaga serta meminimalisir hilangnya arus komunikasi yang terjalin antara keduanya.

Namun kendala komunikasi masih dapat terjadi karena adanya celah yang terlewatkan pada proses komunikasi yang dilakukan para stakeholder. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, Unesa bersama Pemkab Magetan selalu intens menjalin komunikasi. Namun sayangnya, Unesa bersama Pemkab Magetan luput untuk berkomunikasi yang harusnya juga dijalin oleh pihak-pihak yang nantinya dapat terdampak akan adanya kolaborasi ini, salah satunya universitas lokal di Magetan. seperti pemaparan oleh bapak Sumanto berikut ini:

“Ya memang sebelumnya ada perguruan tinggi lokal yang merasa sedikit khawatir dan mempertanyakan Unesa yang membangun PSDKU di Magetan. Sempat istilahnya *ngewadulah* ke Dikti. Tapi hal ini merupakan hal biasa yang setelah kita berkomunikasi dengan mereka dan memberikan pemahaman, alhamdulillah kesalahpahaman tersebut sudah *clear*.” (hasil wawancara bapak Sumanto selaku Ketua Komisi A DPRD Kab. Magetan).

Kekhawatiran tersebut meliputi rasa keresahan universitas lokal yang cemas akan eksistensi mereka jika adanya universitas negeri lain. Termasuk juga kekhawatiran akan berkurangnya peminat universitas tersebut yang nantinya dapat berpindah minat kepada Unesa sehingga keberadaan universitas lokal dapat terancam. Universitas di Magetan yang baru mendengar kabar akan dibukanya PSDKU Unesa di wilayah ini merasa terkejut dan memiliki kekhawatiran, mereka melaporkan hal tersebut kepada Dikti yang diteruskan kepada Unesa. Dengan adanya laporan tersebut Unesa menjelaskan sekaligus memberikan pemahaman bahwa segmentasi dari universitas ini berbeda sehingga Unesa tidak akan mengganggu universitas lokal tersebut karena peminat dari fokus ilmu yang ditawarkan juga berbeda.

Kendala pada perizinan juga erat kaitannya dengan komunikasi yang dibangun antar Unesa kepada Dirjen Dikti. Turunnya perizinan PSDKU yang membutuhkan waktu lama membuat pembukaan pendaftaran mahasiswa PSDKU tidak segera dilaksanakan karena belum adanya izin yang dikantongi Unesa. Pihak Unesa berpendapat bahwa mereka juga tidak bisa tanpa pertimbangan untuk meminta menyetujui pemrosesan izin ini, hal ini dikarenakan permintaan perizinan terkait pendidikan tinggi di Dikti bukan hanya dari Unesa saja melainkan juga dari banyak pihak lainnya. Sehingga dokumen-

dokumen yang diproses di tingkat Dikti ini harus diprioritaskan berdasarkan urgensi dan atrean yang ada.

Berkaca dari keterangan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Unesa dan Magetan saling berpendapat pertemuan awal keduanya memiliki kesan yang baik dan komunikasi antara keduanya tidak menemui masalah. Komunikasi yang dijalin antar Unesa dan Magetan ini terlaksana tanpa adanya tendensi serta intervensi. Namun masalah yang terjadi terletak pada komunikasi yang diciptakan kepada pihak diluar Unesa dan Pemkab Magetan. Karena juga perlu diingat terkait kendala dengan pihak di luar *stakeholder*, komunikasi juga harus dijalin lebih erat termasuk kepada pihak-pihak yang mungkin bersinggungan dengan PSDKU Unesa ini supaya kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman maupun risiko sebagaimana kendala yang terjadi yakni kepada universitas lokal dan Dirjen Dikti

3. Komitmen

Komitmen berarti sebagai perjanjian yang mengandung tujuan, nilai-nilai termasuk sasaran secara terikat untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kesepakatan bersama (Subagyo, 2014). Hubungan timbal balik sebagai sebuah upaya dalam kewajiban pemenuhan hak-hak pihak yang berkolaborasi sehingga apa yang diharapkan dapat didapatkan. Timbal balik tersebut maksudnya adalah apa yang dilakukan atau diberikan oleh individu kepada organisasi sebagai imbalan dari apa yang telah organisasi berikan kepadanya (Kuhn, 2020). Hubungan timbal balik yang terjalin antara Unesa dan Pemkab Magetan tersirat pada bagaimana hubungan kolaborasi ini dibentuk. Unesa dapat memperluas jaringannya melalui PSDKU Unesa Kampus Magetan ini sedangkan Pemkab Magetan dapat memberikan kemudahan akses pendidikan perguruan tinggi kepada masyarakat Magetan yang nantinya akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Dalam cara yang dipilih untuk membentuk komitmen, Unesa bersama Magetan mengedepankan diskusi sehingga nantinya kedua pihak saling mengetahui dan menyetujui komitmen yang ingin dibawa.

“Caranya kita saling berdiskusi, karena dalam membentuk komitmen itu harus sesuai dengan tujuan dan kepentingan dari programnya. Sehingga pihak lain harus saling mengetahui dan menyetujui komitmen yang ingin dibawa.” (hasil wawancara bapak Sumanto selaku Ketua Komisi A DPRD Kab. Magetan).

Unesa beserta Magetan memilih untuk saling berdiskusi karena dalam menciptakan komitmen, haruslah sesuai dengan kepentingan, tujuan serta peraturan yang ada yang telah disepakati sebelumnya. Seluruh pihak yang tergabung dalam kolaborasi juga harus saling mengetahui sekaligus menyetujui komitmen

tim yang ingin dibawa. Komitmen inilah yang nantinya terus dibawa dan menjadi semangat para aktor untuk mewujudkan tujuan bersama dalam membangun PSDKU Unesa Kampus Magetan.

Komitmen antara Unesa dan Pemkab Magetan ini berusaha diwujudkan bukan hanya pada aspek tatanan pimpinan semata, tetapi juga mencakup aspek tatanan regulasi atau peraturannya. Jangan sampai di masa yang akan datang saat ada pergantian kepemimpinan, tatanan regulasi PSDKU ini juga ikut berubah. Sebagaimana keterangan dari Bapak Martadi berikut:

“Komitmen kita harus diwujudkan bukan hanya pada aspek tatanan pimpinan tetapi juga tatanan regulasi, jangan sampai nanti saat berganti pimpinan tatanan regulasi ikut berubah. *Nah* di kita sudah memastikan itu dan masuk di peraturan pemerintah kita yang ditandatangani langsung oleh presiden” (hasil wawancara dengan bapak Martadi selaku koordinator tim perencanaan PSDKU Unesa Kampus Magetan).

Sebagai upaya pencegahan kemungkinan persoalan pergantian pimpinan terjadi, kedua pihak sudah memastikan bahwa persoalan tersebut telah secara jelas tertulis di Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditandatangani langsung oleh presiden. Dengan MoU sebagai dasar dari hubungan kolaborasi ini. Pada peraturan pemerintah tersebut dikatakan bahwa Universitas Negeri Surabaya memiliki kampus di luar kampus utama yang berlokasi di Kabupaten Magetan. Artinya dalam peraturan secara yuridis, kolaborasi ini memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi dari pembentukan komitmen tatanan pimpinan ini diperkuat dengan peraturan pemerintah sehingga nantinya komitmen tersebut tidak akan mudah berubah setelah berganti kepemimpinan karena sifatnya yang mengikat. Namun, untuk meminimalisir adanya komitmen yang tidak dijalankan, penerapan Peraturan Pemerintah menjadi pegangan yang ditaati sekaligus dijalankan dalam ranah kolaborasi ini.

“Sudah, memang kolaborasi PSDKU ini sudah ada PP-nya. Kita juga sudah pastikan kalau PP ini ditandatangani oleh presiden supaya kedepannya kolaborasi ini memiliki dasar hukum dan komitmen yang dibawa oleh masing-masing pihak tetap terjaga.” (hasil wawancara dengan Ibu Vinda selaku Kepala UPT Humas Unesa).

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Magetan juga ingin memberikan komitmen jangan sampai saat Kabupaten Magetan berganti kepemimpinan, kemudian komitmennya ikut berganti pula. Karena banyak sekali contoh program atau pembangunan yang merupakan program kerja pemimpin sebelumnya yang mangkrak setelah pemimpin tersebut lengser dari jabatannya. Tentunya hal tersebut sangat merugikan mengingat biaya

yang digelontorkan demi membangun program tersebut tidaklah sedikit. Sehingga sebelum masa jabatan Bupati Magetan habis, semua urusan administrasi ditargetkan harus sudah *clear*. Misalnya seperti pergantian balik nama untuk sertifikat tanah. Saat ini sertifikat lahan PSDKU sudah berganti menjadi atas nama Unesa. Jika sertifikat kepemilikan Unesa, maka pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Unesa tanpa ada intervensi dari Pemkab Magetan. Artinya jika nanti terjadi permasalahan dalam tatanan kepemimpinan Kabupaten Magetan, PSDKU ini tetap akan berjalan sebagaimana mestinya karena sepenuhnya dikelola oleh Unesa.

Kemudian juga terdapat komitmen politik yang ingin diberikan oleh Unesa kepada Pemkab Magetan. Yaitu dengan beberapa kali mengundang pimpinan DPRD bersama Komisi A ke Kampus Unesa untuk melakukan audiensi. Tujuan dari dilakukannya audiensi tersebut supaya niat baik yang telah dibentuk ini dapat segera terwujud. Kemudian diwujudkan dengan tindakan serta komitmen yuridis (hukum) sebagai payungnya. Pihak Unesa dan Pemkab Magetan juga telah sadar akan tanggung jawab dan perannya masing-masing dalam kolaborasi ini. Karena tanggung jawab tersebut juga merupakan konsekuensi dari kegiatan membangun komitmen. Seperti contohnya, Unesa sadar betul bahwa kedepannya industri penambahan alokasi anggaran dan rekrutmen pegawai baru, hal-hal tersebut pun sudah masuk ke dalam rancangan strategis Unesa.

Dapat peneliti simpulkan bahwa komitmen yang dibawa oleh Unesa dan Pemkab Magetan telah mencakup komitmen berupa tatanan regulasi dan tatanan kepemimpinan. Tatanan regulasi dan tatanan kepemimpinan inipun telah menjadi akad yang disepakati oleh kedua pihak serta *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi ini. Komitmen ini harus terus dibawa sejalan dengan pelaksanaan kolaborasi yang jika tidak ditaati sebagaimana mestinya, maka harus bersedia menerima konsekuensi yang sebagaimana tertuang pada PP (Peraturan Pemerintah) serta MoU yang menjadi dasar dari kolaborasi PSDKU Unesa Kampus Magetan.

4. Saling Percaya

Kepercayaan menjadi elemen penting yang ada dalam sebuah hubungan bekerjasama (Raharso, 2011). Rasa saling percaya sangat kuat pengaruhnya dengan timbulnya sebuah sinergitas. Sehingga rasa kepercayaan itu ekuivalen kedudukannya dengan perilaku sebuah sinergi atau kolaborasi (Sulasmi, 2018). Jika suatu kolaborasi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, maka para kolaborator akan lebih nyaman untuk berkontribusi dalam usaha mencapai tujuan organisasi serta mengesampingkan tujuan pribadinya (Prastio et al., 2019). Kepercayaan yang saling diberikan secara otomatis mendorong kelancaran proses kolaborasi, yang

nyatanya dengan efektif membentuk keterbukaan baik secara informasi maupun strategi pengembangan dari program yang dijalankan.

Unesa dan Pemkab Magetan memandang bahwa kepercayaan itu dapat muncul ketika kedua pihak sama-sama berkomunikasi dengan baik. Diikuti dengan keinginan untuk terus membangun koordinasi yang didasari oleh niat baik yang sama. Keduanya telah sama-sama berkomitmen dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati sehingga dari fakta dilaksanakannya komitmen sesuai kesepakatan tersebut membuat Unesa percaya kepada Pemkab Magetan dan Pemkab Magetan pun percaya dengan Unesa. Singkatnya, karena segala aspek yang menjadi hak-haknya terpenuhi dan tak lupa kewajiban-kewajibannya juga turut dilaksanakan. Kedua belah pihak juga menyatakan untuk saling memberikan dukungan dan memegang komitmen yang sudah dibangun.

Cepatnya proses kolaborasi PSDKU Unesa Kampus Magetan ini juga didasari oleh kepercayaan Pemkab Magetan kepada Unesa sebagai universitas yang memiliki *image* yang sangat baik. Pengalaman selama 76 tahun ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta daya tarik sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki nama besar dan telah memiliki akreditasi A (amat baik). Berbagai pilihan jurusan juga menjadi pertimbangan Magetan menjadikan Unesa menjadi partner kolaborasi. Jurusan-jurusan tersebut juga mayoritas telah terakreditasi sehingga Unesa dinilai mampu membantu Magetan dalam meningkatkan kualitas SDM di daerahnya. Hal ini sejalan dengan dengan *statement* Bapak Warno di bawah ini:

“Sama sekali tidak ada, karena saya yakin bahwa Unesa punya nama besar dan *image* positif serta mahasiswa dan mahasiswi yang jumlahnya sekian ribu itu cukup banyak. Jadi kami sama sekali tidak menaruh keraguan dan kecurigaan.” (hasil wawancara bapak Sumanto selaku Ketua Komisi A DPRD Kab. Magetan).

Begitu pula sebaliknya, Unesa percaya dengan Pemkab Magetan untuk membuka PSDKU pertamanya di daerah tersebut. Sebagaimana dengan yang disampaikan Unesa terkait kepercayaannya dengan Pemkab Magetan seperti hasil wawancara di bawah ini:

“Kami secara hubungan antar lembaga sudah sangat baik ya, jadi Unesa ke Magetan sudah terjalin baik termasuk kepada semua dinas-dinas terkait bahkan DPRD yang selalu hadir dalam setiap pertemuan. Kalau untuk kecurigaan dan rasa keraguan sama sekali tidak ada.” (hasil wawancara dengan Ibu Vinda selaku Kepala UPT Humas Unesa).

Di sisi lain, kepercayaan dari Unesa juga dilihat bahwa Kabupaten Magetan memiliki wilayah yang strategis dan *melting*. *Melting* disini diartikan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan banyak daerah seperti Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Yang mana di berbagai daerah tersebut tidak memiliki perguruan tinggi negeri di daerahnya. Kemudian dari segi animo masyarakat dan kesadaran akan pendidikan tinggi, Kabupaten Magetan memiliki animo yang cukup besar. Keinginan untuk berkuliah dari masyarakatnya serta dukungan dari orang tua yang menginginkan anaknya untuk berkuliah menjadi nilai plus. Tentunya pemilihan Kabupaten Magetan ini bukan sembarangan dilakukan dan telah melewati berbagai studi yang dilakukan oleh Unesa. Hasil dari nilai plus Kabupaten Magetan ini diketahui berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh Unesa dan menjadi indikator penambah rasa kepercayaan Unesa terhadap Pemkab Magetan.

Kesimpulannya, memang sudah tidak ada keraguan satu sama lain antara Unesa dan Pemkab Magetan. Keduanya menyebutkan bahwa belum menemui kendala baik dalam hal politis maupun dalam menyatukan pandangan. Proses dalam menyatukan pandangan ini juga berjalan lancar karena adanya kedekatan pribadi antara pemangku kebijakan. Yakni Bupati Magetan dan Rektor Unesa, yang mana Bupati Magetan merupakan salah satu dewan pengawas Unesa sehingga dalam membangun kepercayaan, kedua pihak tidak menemui kendala karena memang sudah mengenal dan memahami sepak terjang serta kinerja masing-masing.

5. Transparansi/Pertukaran Informasi

Transparansi merupakan wadah dalam menciptakan asas pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya (Mursalim et al., 2019). Transparansi menjadi tolak ukur kejelasan dalam kolaborasi, terlebih pada pertukaran informasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan didalam kolaborasi. Transparansi dapat juga memudahkan alur pertukaran informasi baik antara aktor kolaborasi maupun bagi sasaran dari program kolaborasi tersebut (Irmadella, 2018). Salah satu hal penting dalam melakukan transparansi adalah menerapkan keterbukaan informasi. Hal itulah yang coba diadaptasi oleh Unesa dan Pemkab Magetan dalam menjalankan hubungan kolaborasi. Seluruh informasi serta data dari kolaborasi PSDKU ini terbuka untuk seluruh pihak dan dapat diakses termasuk masyarakat umum dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kedua pihak selalu berkoordinasi dan terdapat pihak ketiga yakni Dirjen Dikti sebagai pengawas jalannya kolaborasi ini,

sehingga dapat menciptakan keterbukaan dalam hubungan kolaborasi.

Masyarakat umum sebagai sasaran dari program PSDKU Unesa Kampus Magetan berhak tahu sampai mana program ini bergulir. Karena sejalan dengan kebutuhan pendidikan pula, masyarakat pasti ikut memantau bagaimana Kampus Unesa Magetan ini disusun. Dalam mewujudkan hal tersebut, Unesa dan Pemkab Magetan menggunakan berbagai media yang dirasa efektif untuk menyalurkan informasi. Seperti penjelasan Bapak Warno berikut ini:

“Semua informasi sifatnya terbuka dan tidak ada yang ditutupi, bahkan juga ke media, karena media adalah bentuk dari akuntabilitas publik dan media sebagai penyebaran informasi ke masyarakat. Seperti lewat radio, Kece TV, Jawa Pos, JTV Surabaya, RRI Madiun sampai *talkshow* di pendopo Kabupaten Magetan. Kesadaran akan transparansi dan keterbukaan informasi kita jalankan sebaik baiknya.” (hasil wawancara bapak Warno selaku Wakil Ketua III DPRD Kab. Magetan).

Pertukaran informasi juga aktif dilakukan sebagai bentuk transparansi. Unesa selalu aktif memberikan info-info terkait perkembangan izin PSDKU. Begitu pula sebaliknya, Pemkab Magetan tetap aktif memantau sampai mana perjalanan izin PSDKU ini bergulir. Seluruh aspek dari pemangku kebijakan saling bertukar informasi dan memaparkan data-datanya. Salah satunya dengan cara melakukan presentasi yang turut dihadiri oleh anggota DPRD Magetan, seluruh Camat serta Lurah. Kemudian untuk menjangkau masyarakat luas serta para siswa sekolah beserta orang tua mereka, Unesa memanfaatkan media mereka yang bernama Kece TV untuk melakukan siaran langsung.

Transparansi juga harus ikut dibangun sebagaimana penyebaran serta pertukaran informasi ini dibentuk. Karena saat Pemkab Magetan dan Unesa merancang keterbukaan akan informasi, maka otomatis transparansi tersebut perlahan juga ikut tercipta. Dengan melakukan transparansi, faktor lain yang juga dapat terbentuk ialah kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang didapatkan oleh instansi publik sangat erat kaitannya dengan transparansi yang dilakukan (Sofyani & Tahar, 2021). Untuk membentuk citra instansi serta meraih kepercayaan publik, melakukan transparansi dan keterbukaan informasi dapat menjadi strategi yang dapat diadaptasi.

Terkait hal-hal apa saja yang ditransparansikan dalam kolaborasi ini oleh Pemkab Magetan meliputi dari apa saja yang dilakukan termasuk pada kendala-kendala yang dialami. Contohnya seperti sudah sampai sejauh mana pembangunan dari bangunan PSDKU ini berjalan, kendala-kendala yang dialami selama proses kolaborasi termasuk kepada pendapat individu-individu.

Hal tersebut perlu ditransparansikan dengan cara diutarakan kepada setiap anggota kolaborasi dengan tujuan seluruh anggota dapat mengetahui dan berbagi pemikiran guna memaksimalkan kolaborasi ini. Lalu pengambil keputusan dapat mempertimbangkan pendapat-pendapat tersebut mana yang baiknya diambil dan mana yang baiknya dihindarkan saja. Kegiatan tersebut tentunya sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan bertukar informasi agar informasi yang ada tetap bisa diketahui oleh masing-masing pihak meskipun terpisah oleh jarak yang cukup jauh.

Unesa juga menyatakan pendapatnya terkait dengan pertukaran informasi ini seperti yang dapat dilihat pada wawancara berikut:

“Ya, kita selalu senantiasa untuk bertukar informasi. Informasi yang berkaitan dengan hasil studi kelayakan, izinnya sudah sampai mana. Apalagi kalau dalam rapat-rapat dan pertemuan kita selalu menginformasikan apa saja progres yang telah masing-masing lakukan dalam pelaksanaan tugasnya.” (hasil wawancara dengan Ibu Vinda selaku Kepala UPT Humas Unesa).

Selain itu, hal-hal yang ditransparansikan meliputi informasi yang berkaitan dengan hasil dari studi kelayakan yang telah dilaksanakan oleh Unesa. Prodi apa saja yang diminati, antusiasme masyarakat dan seberapa baik pandangan masyarakat terhadap Unesa di Kabupaten Magetan. Kemudian juga berkaitan dengan perizinan yang mana untuk uruan perizinan ini merupakan ranah Unesa dengan Dikti. Sehingga setiap informasi serta langkah yang dilakukan, Unesa selalu memberikan *update* info kepada Pemkab Magetan. Terlebih dalam rapat serta pertemuan, masing-masing anggota dengan berbagai tupoksi yang berbeda membeberkan sampai sejauh mana *progress* yang telah dilakukan.

Salah satu strategi yang digunakan untuk menciptakan transparansi sekaligus melakukan pertukaran informasi yakni dengan memanfaatkan peran media. Pemanfaatan media baik cetak maupun digital digunakan semaksimal mungkin dalam penyebaran informasi terkait sampai mana proses PSDKU ini berjalan. Sebagai bentuk dari akuntabilitas publik bagi masyarakat, informasi PSDKU ini disebarkan ke berbagai media melalui radio, Kece TV, Jawa Pos, JTV, RRI Madiun, serta penyelenggaraan berbagai *talkshow* yang bertempat di Pendopo Kabupaten Magetan. Kesadaran akan keterbukaan informasi dan transparansi telah dilakukan sebaik-baiknya diikuti dengan banyaknya pihak yang dapat mengawasi proses kolaborasi ini. Pemanfaatan media ini juga memiliki kelebihan pada proses dokumentasinya. Dengan adanya berbagai media yang dapat diakses sehingga tahapan-tahapan kolaborasi dapat terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan dari paparan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa Unesa bersama Pemkab Magetan memiliki antusiasme yang besar dalam mewujudkan transparansi melalui pertukaran informasi. Terlihat dari keberagaman berbagai media yang digunakan untuk menyalurkan informasi seluas-luasnya. Di sisi lain juga terlihat bagaimana informasi-informasi yang *disharing*-kan satu sama lain serta keterbukaan yang dijadikan sebagai salah satu komitmen untuk mengurangi disinformasi dan kesalahpahaman antar *stakeholder*. Sehingga transparansi tersebut dapat tercipta seiring dengan para aktor yang senantiasa memberikan informasi-informasi kepada pihak lain sebagaimana dalam kolaborasi yang baik.

6. Berbagi Pengetahuan

Kualitas instansi dan kualitas individu yang tergabung kedalam kolaborasi menjadi faktor kuat dalam studi berbagi pengetahuan (Badar & Seniati, 2017). Pada indikator ini aktor dalam kolaborasi saling menuangkan pemikiran yang bermula pada kegiatan berdialog. Dengan tujuan untuk mentransformasikan pengetahuan tersebut dari ide implisit menjadi ide eksplisit. Karena dengan pengetahuan tersebut, kedua pihak kolaborasi dapat mengungguli pesaing-pesaingnya karena memiliki kemampuan untuk mempelajari pengetahuan baru (Geiyono et al., 2018).

Pertukaran informasi yang terjadi dapat mendukung terciptanya keterbukaan wawasan pada bidang atau fokus yang berbeda serta perepresentasian pengetahuan tersebut secara logis (Putri dan Pangaribuan, 2009). Masing-masing pihak menuangkan pemikirannya guna mengoptimalkan PSDKU Unesa Kampus Magetan, supaya manfaat yang dirasakan berdampak besar bagi seluruh aspek kehidupan. Karena pembenahan melalui pendidikan dapat mengatasi masalah terkait kemiskinan, SDM, tingkat pengangguran, angka kriminalitas dan lainnya. Dalam artian lain, pendidikan dapat menjadi fondasi dasar bagi manusia dalam meningkatkan kualitas dirinya dalam bersaing dengan manusia lain.

Pada berbagai pertemuan terutama saat diskusi dengan, kedua pihak saling mengemukakan pendapatnya serta ide-ide yang dianggap dapat memaksimalkan PSDKU ini. Tujuannya agar masing-masing pihak dapat mengutarakan pendapatnya serta berbagi pengetahuan baru sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Dibuktikan dengan Pemkab Magetan yang mencarikan beberapa pilihan lokasi yang dianggap cocok untuk membangun PSDKU di beberapa wilayah Kecamatan Maospati, diantaranya Kelurahan Mranggen, Kelurahan Kraton, Kelurahan Mangge dan Kelurahan Bengkok. Kemudian Unesa memberikan sarannya untuk membuka tiga prodi berdasarkan survei prodi yang paling diminati di Magetan sekaligus tidak dimiliki oleh perguruan tinggi

lokal yang telah ada sebelumnya yaitu S1 Pendidikan dan Kepelatihan Olah Raga, S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dan S1 Pendidikan Sekolah Dasar.

Ketiga prodi yang dibuka tersebut telah ditimbang aspek kelayakan, akreditasi, peminat juga proyeksi ketersediaan jurusan tersebut pada perguruan tinggi lokal serta proyeksi kebutuhan pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan. Untuk PSDKU di tahun pertama, program studi yang dibuka haruslah sudah terakreditasi A. Dari aspek-aspek yang ditimbang tersebut serta survei yang dilakukan kepada beberapa sampel uji, didapatilah hasil bahwa S1 Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga, S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dan S1 Pendidikan Sekolah Dasar yang akan menjadi tiga prodi pembuka di awal pelaksanaan PSDKU Unesa Kampus Magetan. kedepannya Unesa akan menambah prodi-prodi baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut seiring dengan bertambahnya peminat kampus ini. Menurut Pemkab Magetan, pengetahuan yang dibagi oleh Unesa dengan menggunakan studi kelayakan ini sangat dirasakan manfaatnya, pemaparan tersebut sebagai berikut:

“Studi kelayakan ini sangat bermanfaat. Dari pengetahuan yang dimiliki Unesa itu kita jadi punya pengetahuan baru, *oh* masyarakat Magetan itu minatnya jurusan ini, sukanya belajar ini, kebanyakan punya minat kuliah di Unesa dan lain-lain. Kita jadi punya datanya juga terkait minat pendidikan tinggi masyarakat kita.” (hasil wawancara bapak Sumanto selaku Ketua Komisi A DPRD Kab. Magetan).

Sampel uji yang digunakan untuk pengukuran studi kelayakan pembangunan PSDKU Unesa Kampus Magetan ini bukan hanya dari masyarakat Magetan saja. Namun juga meliputi masyarakat Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Pacitan. Karena secara fakta empiris, berbagai wilayah tersebut merupakan kabupaten yang berada di Jawa Timur bagian barat, yang mana akses pendidikan untuk ke jenjang perguruan tingginya belum merata.

Kedua pihak baik Unesa maupun Magetan dengan padu mengatakan bahwa benar-benar merasakan manfaat dari adanya pengetahuan-pengetahuan yang dibagikan tersebut. Dari hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Unesa, Pemkab Magetan merasakan bahwa mereka memiliki pengetahuan baru tentang bagaimana masyarakatnya memandang pendidikan tinggi. Termasuk bagaimana minat jurusan, antusiasme untuk berkuliah bahkan antusiasme masyarakat Magetan dalam menyambut PSDKU Unesa Kampus Magetan ini. Sehingga Pemkab Magetan dapat memiliki data tersebut yang tentunya sangat bermanfaat. Di lain sisi, Unesa

juga merasa sangat terbantu dengan pengetahuan yang diberikan oleh Pemkab Magetan mengenai rekomendasi lokasi yang dirasa cocok untuk dijadikan lokasi PSDKU Unesa ini berdiri. Dari pengetahuan yang dibagikan Magetan, Unesa memaparkan bahwa pengetahuan tersebut sangat bermanfaat dalam menimbang dan memutuskan tempat berdirinya PSDKU Unesa. Seperti yang dipaparkan berikut ini:

“Tentu pengetahuan yang dibagikan kepada kita itu sangat bermanfaat ya. Magetan dengan pengetahuan mendalam terkait daerahnya memberikan beberapa pilihan tempat yang memiliki lahan luas, akses mudah dan lingkungan yang baik sehingga dari opsi itu bisa kita pertimbangkan.” (hasil wawancara dengan Ibu Vinda selaku Kepala UPT Humas Unesa).

Pengetahuan Magetan terkait pemahaman yang baik dengan daerahnya dapat dimanfaatkan sebagai modal memilih tempat dibangunnya PSDKU Unesa. Dengan pertimbangan dan kebutuhan lahan yang diperlukan Unesa. Dan pilihan jatuh kepada lahan dengan memiliki aksesibilitas yang mudah dengan tempat publik.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang dituliskan diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa dalam berbagi pengetahuan ini Unesa bersama Pemkab Magetan benar-benar merasa terbantu. Dua pihak yang berkolaborasi dengan bidang yang berbeda membuat pengetahuan yang didapat menjadi lebih luas yang tentunya berkaitan dengan dunia pendidikan dan pemerintahan.

7. Kesiapan Mengambil Risiko

Kesiapan dalam mengambil risiko memiliki andil yang besar dalam menentukan keberhasilan dari hasil kolaborasi. Dalam setiap pengambilan keputusan sekecil apapun sudah barang pasti terdapat risiko didalamnya (Puspitasari, 2018). Maka diperlukan kemampuan untuk menganalisis risiko-risiko yang mungkin muncul ketika kolaborasi telah disepakati bersama kemudian dijalankan (Taufik dkk., 2022).

Unesa memandang kolaborasi dalam pembangunan PSDKU kemungkinan beresiko pembengkakan dana. Dosen yang mengajar di kampus Unesa Kampus Surabaya tidak bisa serta merta ditransfer mengajar ke Magetan kecuali menggunakan penugasan resmi sehingga Unesa mungkin harus merekrut sumber daya baru agar dapat memenuhi kelayakan Kampus Unesa Magetan. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan manajemen anggaran Unesa. Risiko lainnya berada pada aspek mahasiswa, karena jika nantinya saat PSDKU Magetan dijalankan tetapi jumlah mahasiswa yang mendaftar tidak memenuhi target, maka tentu Unesa akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, Unesa dan Pemkab

Magetan tidak ingin gegabah dan menimbang banyak aspek karena telah melakukan manajemen risiko.

Pada awal kolaborasi ini, Pemkab Magetan sebenarnya memiliki sedikit kekhawatiran akan adanya pihak yang mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Terlebih lagi pada proses pelaksanaan nantinya. Seperti misalnya jika ada ketidaksesuaian atau pengabaian perjanjian maka tentu, pihak yang paling terdampak jika hal tersebut benar terjadi adalah putra-putri daerah Kabupaten Magetan yang mengenyam pendidikan di Unesa Kampus Magetan.

Tetapi pihak Magetan memandang bahwa risiko itu dapat dihindari dengan cara memperkuat dasar hukum bagi pelaksanaan PSDKU Unesa Magetan. Pemkab Magetan telah memastikan bahwa nota perjanjian telah ketat mengatur tugas dan tanggung jawab Unesa yang disertai dengan konsekuensi apa yang harus diterima jika Unesa lalai dalam melakukan tugasnya. Begitu pula Kabupaten Magetan, berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah timbulnya risiko serta rasa kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Kedua belah pihak juga telah berkomitmen untuk mengatasi risiko, ditunjukkan saat akses jalan ke PSDKU Unesa Kampus Magetan yang dirasa belum memadai. Kemudian mereka berdiskusi langkah yang diambil dan siapa yang mengatasi. Akhirnya disepakati bahwa Pemkab Magetan yang akan bertugas untuk membuka akses jalan sekaligus pembebasan lahan serta Unesa yang akan membeli lahannya. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk risiko dimana Unesa terpaksa harus mengeluarkan dana lebih untuk akses jalan karena keterbatasan APBD Kabupaten Magetan dan peruntukannya yang tidak memungkinkan. Maksud dari peruntukan yang tidak memungkinkan tersebut adalah Pemkab Magetan tidak bisa membeli lahan yang kemudian lahan tersebut dihibahkan kepada pihak Unesa.

Namun dengan berbagai risiko tersebut, terdapat motivasi yang menjadi alasan mengapa mereka tetap memilih melaksanakan kolaborasi ini. Pemkab Magetan memaparkan bahwa motivasi mereka sehingga tetap bersedia berkolaborasi meskipun sadar akan kemungkinan risiko adalah adanya keinginan untuk memiliki kampus sendiri di wilayahnya. Karena pembangunan kampus tersebut sebagai perwujudan dari pemberian fasilitas bagi putra-putri daerah yang ingin mengenyam pendidikan tinggi. Sehingga akses pendidikan tinggi menjadi lebih mudah dan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan terpenuhi. Seperti yang tertera dalam wawancara berikut ini:

“Motivasinya karena kita ingin memiliki kampus di wilayah sendiri. Memberi fasilitas bagi anak daerah yang ingin berkuliah. Karena anak-anak daerah itu nanti yang membangun Magetan *kan*,

makanya kita bantu fasilitasi. Pendidikan ini kan juga bisa meningkatkan IPM daerah.” (hasil wawancara bapak Sumanto selaku Ketua Komisi A DPRD Kab. Magetan).

Unesa juga mengungkapkan motivasi mereka tetap memilih melaksanakan kolaborasi ini meskipun ada kemungkinan risiko karena sebagai perguruan tinggi negeri, Dengan menimbang manfaat yang akan diterima nantinya beserta risiko yang dapat terjadi, Unesa tetap bersedia berkolaborasi. Terlebih Unesa telah melakukan analisis serta memetakan potensi, urgensi, ancaman serta kepentingan dari kolaborasi ini sehingga risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir nantinya. Seperti yang dapat dilihat pada kutipan wawancara di bawah ini:

“Karena dalam analisis SWOT, kita telah memetakan pentingnya apa, potensinya apa, ancamannya apa. Mengingat manfaat yang akan diterima masyarakat begitu besar nantinya, ya seperti Unesa Ketintang inilah, ekonomi bergeliat, ketimpangan pendidikan kecil, Karena kalau kita takut akan risiko ya tidak akan ada maju.” (hasil wawancara dengan Ibu Vinda selaku Kepala UPT Humas Unesa).

Kesimpulan yang dapat peneliti paparkan adalah kedua pihak tetap bersedia menjalankan kolaborasi ini karena menimbang berbagai manfaat yang akan diterima oleh masyarakat nantinya lebih besar ketimbang risiko yang harus diambil. Lagi pula, menurut mereka risiko tersebut dapat dihindari dengan melakukan perencanaan yang matang. Mereka juga memaksimalkan proses dalam implementasi pada aspek pengawasan. Kolaborasi serta pembangunan PSDKU ini juga dilakukan sesuai prosedur sehingga jika nantinya di lapangan ada ketidaksesuaian, maka risiko yang ditimbulkan dapat diminimalisasi. Strategi selanjutnya yaitu dengan membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar semua yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai *timeline* serta target yang sudah ditetapkan. Jangan sampai karena kurangnya koordinasi lalu target-target tersebut tidak dapat dicapai, karena jika target tidak tercapai maka bisa muncul risiko lain yang harus ditanggung kedua pihak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada berbagai pemaparan yang telah disajikan diatas, Dalam tujuh indikator kolaborasi yang dikemukakan oleh Schottle, Haghsheno dan Gehbauer (2014) yang dimuat dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa kolaborasi ini telah berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kedua pihak mengedepankan asas “saling” dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada rasa “bekerja sendiri” karena kedua pihak sama-sama menjalankan wewenang serta kewajibannya dengan

semaksimal mungkin. Kepercayaan yang sedari awal telah terbentuk antara Bupati Magetan, Rektor Unesa dan Koordinator Tim Perencanaan PSDKU bahkan sebelum kolaborasi ini dimulai membuat kedua pihak tidak sulit untuk menaruh kepercayaan satu sama lain. Karena masing-masing pihak sudah mengetahui bagaimana kinerja dan sepak terjangnya. Mereka juga berpegang teguh kepada komitmen yang dibentuk sebagai upaya menjaga hubungan kolaborasi dalam pembangunan PSDKU ini tetap berjalan *on the track* sesuai *timeline* dan kesepakatan. Dibuktikan dengan proses pembangunan PSDKU Unesa Kampus Magetan ini yang cukup cepat jika dibandingkan PSDKU universitas lain dengan daerah lain yang masing berkuat dengan tendensi yang dibawa masing-masing pihak selama belasan tahun.

Namun masih terdapat adanya faktor penghambat yakni pada indikator komunikasi. Hubungan komunikasi pada lingkup yang lebih luas dari aktor kolaborasi masih luput dilakukan. Masih terdapat celah terjadinya kesalahpahaman dan miskomunikasi antara *stakeholder* dengan pihak luar yakni universitas lokal di Magetan. Sehingga berdasarkan hasil dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan kolaborasi yang terjalin antara Universitas Negeri Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pembangunan PSDKU Unesa Kampus Magetan sejauh ini masih terdapat hambatan pada indikator komunikasi meskipun kendala tersebut telah diselesaikan dengan cara memberi pemahaman kepada pihak yang bersangkutan. Dalam melakukan studi kepustakaan pula, peneliti belum dapat menemukan dokumen Peraturan Pemerintah (PP) atau MoU kerjasama. Sehingga peneliti perlu menanyakan dokumen tersebut secara langsung kepada Unesa guna melengkapi penelitian ini.

Saran

Adapun saran serta rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unesa beserta Magetan perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi bukan hanya kepada pihak yang terlibat dalam kolaborasi, namun juga kepada pihak yang terdampak dan bersinggungan dengan adanya kolaborasi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman serta meminimalisir kendala serupa terjadi dikemudian hari.
2. Unesa dapat terus meminta informasi dan rajin menanyakan kabar terbaru kepada Dirjen Dikti terkait proses perizinan PSDKU. Sehingga ketika izin tersebut telah ditandatangani, Unesa dapat segera mempersiapkan peresmian gedung PSDKU Unesa Kampus Magetan sekaligus penerimaan mahasiswa barunya.

3. Setelah naskah kesepakatan dan peraturan-peraturan tersebut turun dari pusat, Unesa bersama Pemkab Magetan dapat segera mempublikasikan peraturan pemerintah serta nota kesepakatan tersebut ke situs-situs resmi milik mereka untuk memudahkan khalayak umum mengetahui dasar hukum dari kolaborasi PSDKU Unesa Kampus Magetan.
4. Izin serta Peraturan Pemerintah (PP) PSDKU Unesa belum turun saat penelitian ini dilakukan, maka saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah ketika izin serta PP tersebut telah keluar, peneliti dapat menganalisa lebih dalam kolaborasi ini dengan dasar hukum serta peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris and Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice , Chris Ansell and Alison Gash. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 1–12.
- Badar, E. F., & Seniati, A. Ni. L. (2017). Pengaruh Trust Terhadap Berbagi Pengetahuan Melalui Mediasi Komitmen Organisasi pada Dosen Perguruan Tinggi. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(1), 7–27.
<https://doi.org/10.23917/indigenous.v1i1.4459>
- Bogdan, B., & Bilken, S. K. (1992). Quality research for education: An introduction to theory and methods. *Qualitative Research For Education An Introduction to Theory and Methods : : Allyn and Bacon.*, 106–156.
- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2020). Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Dega Digital. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(2), 127.
<https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8909>
- Irmadella, A. (2018). Model Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–11.
- Kooiman, J. (2007). The Governance Perspective. *Public Administration*, 8(2), 164–165.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-2679.2007.00245.x>
- Kuhn, T. (2020). The structure of scientific revolutions. In *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective: Vol. II* (Issue 2).
<https://doi.org/10.5840/philstudies196413082>
- Mursalim, S. W., Hasibuan, A., Sulaiman, oris kianto, Mulyanie, E., Husna, R. A., Apriandi, I., Maiti, Bidinger, Suryana, A., Iskandar, A., Hernawan, D., Dengo, S., Rahmadanita, A., Santoso, E. B., Wasistono, S., Marisa, H., Andree, Sarbini, A., Kusuma, A. R., ... Theory, P. (2019). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 2).
<https://kominform.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/buku-2.-masterplan-smart-city-kota-bogor.pdf>
- Nurron, O. M., Nurasa, H., & Halimah, M. (2022). Collaborative Governance Dalam Program Riset Teknologi Kendaraan Listrik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 91–97.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p91-97>
- Perdana, N. S. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Factors That Influence the Accessibility of Education For Children in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3), 279–298.
- Pfeifer, H., & Schwab, R. (2022). Politicising the rebel governance paradigm. Critical appraisal and expansion of a research agenda. *Small Wars & Insurgencies*, 00(00), 1–23.
<https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2144000>
- Pohan, D. D., & Fitria, U. S. (2021). Jenis Jenis Komunikasi. *Journal Educational Research and Social Studies*, 2, hal. 31.
- Prastio, L. O., Suwaryo, U., & Yuningsih, N. Y. (2019). Aktor Terhadap Proses Kolaborasi Pada Program Pemagangan Nasional Di Kabupaten. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 200–223.
- Puspitasari, D. C. (2018). Wirausaha Muda Membangun Desa: Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. *Jurnal Studi Pemuda*, 4(2), 330.
<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36817>
- Putri, S. S., & Pangaribuan Togar Harapan. (2009). Knowledge Management System: Knowledge Sharing Culture Di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 2009(Snati)*, 65–70.
- Rahaju, T., Widjiastuti, A., & Pradana, G. W. (2020). Stakeholder Collaboration: Strategies to Strengthen Disability Capacity Achieve Economic Independence in Madura. *Icss*, 175–180.
<https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.38>
- Raharso, S. (2011). Kepercayaan Dalam Tim. *Jurnal MANAJERIAL*, 10(2), 42–53.
<https://doi.org/10.17509/manajerial.v10i2.2164>
- Sahita, N. E., & Ma`ruf, M. F. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Pemerintah Desa Bandungrejo , Pt . Pertamina Ep Cepu , Dan Institute Development of Society). *Publika*, 8(3), 1–10.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/34678>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25.
<https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Subagyo, A. (2014). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Self Efficacy Terhadap Komitmen Organisasional Dosen Politeknik Negeri Semarang. *Orbith*, 10(1), 74–81.

